



BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pendidikan Karakter Siswa

1. Manajemen Pendidikan

Kata manajemen merupakan bahasa latin yaitu *manus* dan *agere*. *Manus* berarti tangan, *agere* berarti melakukan; yang jika digabungkan menjadi bentuk kata kerja yakni *managere* yang memiliki arti menangani. Kemudian diubah ke baha inggris menjadi *to manage* yang berarti mengelola/mengatur; dan kata bendanya adalah *management* atau manajemen/pengelolaan dalam bahasa indonesia.¹²

Secara istilah manajemen memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pakar manajemen, diantaranya; (1) ialah seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumberdaya yang ada untuk mencapai target yang telah direncanakan, (2) yaitu suatu proses usaha sekelompok manusia dengan cara bekerjasama yang dilakukan demi tercapainya target tertentu, (3) memberdayakan kegiatan yang dilakukan orang lain demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses koordinasi antar sumberdaya melalui beberapa tahap kegiatan yakni perencanaan, pengorganisasian, penetapan, pengarahan dan pengawasan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di awal.¹³

¹² Ahmad Janan Asifudin, "Manajemen Pendidikan Untuk Pondok Pesantren," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2016): 355–366.

¹³ Ibid.



Fungsi manajemen juga dipakai di dalam dunia pendidikan. Keberadaan manajemen sangat penting dalam proses pendidikan, sebab tanpa adanya pengelolaan yang baik, efektif dan efisien, maka tujuan dari pada pendidikan itu sendiri akan sangat sulit untuk dicapai.

Yamin berpendapat bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai proses yang sistemik, sistematis, dan komprehensif sebagai upaya bersama mencapai dan mewujudkan cita-cita tujuan pendidikan nasional. Selain itu manajemen pendidikan ialah suatu pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yang berupa tujuan jangka pendek, menengah, ataupun tujuan jangka panjang.¹⁴

Menurut E. Mulyasa manajemen pendidikan ialah proses sekelompok orang dalam pengembangan kegiatan secara kerjasama sebagai upaya agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan lebih dulu. Proses pengendaliannya mencakup beberapa bentuk dan tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mentransformasikan visi menjadi aksi.¹⁵

Selanjutnya manajemen pendidikan juga diterjemahkan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur sumber daya pendidikan yang ada untuk menciptakan suasana proses pembelajaran menjadi sedemikian rupa dengan tujuan agar siswa bisa secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk meningkatkan kekuatan spiritual keagamaan,

¹⁴ Moh Yamin, "Manajemen Mutu *Kurikulum Pendidikan*," *Yogyakarta: Diva* (2009). hal. 19.

¹⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 7.



pengendalian diri, budi pekerti luhur, kepribadian, kecerdasan, serta ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Sedangkan penjabaran dari pada fungsi manajemen adalah serangkaian proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar berjalan dan sampai pada tujuan secara efektif dan efisien.¹⁷ Fungsi-fungsi manajemen tersebut yakni:

- a. *Planing* (perencanaan); yaitu proses merancang dan menyusun langkah dan pemikiran untuk mencapai tujuan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian). Dengan menyatukan seluruh komponen menjadi satu kesatuan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai.
- c. *Actuating* (pelaksanaan); adalah kegiatan yang dilakukan oleh segenap komponen manajemen sesuai tugasnya masing-masing dengan fungsi dan keahliannya.
- d. *Controlling* (pengendalian); bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian. Pengendalian dimaksudkan melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya.¹⁸

¹⁶ Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Depdiknas, "Konsep Dan Pelaksanaan," Jakarta: Dirjen Dikdasmen (2007), hal. 6.

¹⁷ Makbuloh Deden, "Manajemen Mutu Pendidikan Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 40.

¹⁸ Samuel Batlajery, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus* 7, no. 2 (2016): 135–155.



Dari pemaparan di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengelolaan atau manajemen pendidikan ialah serangkaian proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mendayagunakan, mengendalikan, dan melakukan berbagai upaya untuk mengatur dan memaksimalkan komponen yang dimiliki baik yang berupa sumber daya manusia dan alam, prasarana dan sarana dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

2. Pendidikan Karakter Siswa

Alangkah baiknya jika kita membedah terlebih dahulu pengertian karakter sebelum memahami makna pendidikan karakter. Namun, beberapa pakar pendidikan secara eksplisit menjelaskan apa itu pendidikan karakter, seperti David Elkind dalam Zubaedi yang mengatakan demikian:

Character education is a concerted effort to aid individuals in comprehending, caring about, and putting ethical principles into practice. When we consider the kind of character we desire in our children, it is evident that we want them to be able to make moral decisions despite peer pressure and internal temptation.¹⁹

Sedangkan menurut Abdullah sebagaimana dikutip Abdul Aziz Dkk. bahwa karakter merupakan pola yang sulit dipatahkan karena sudah begitu mendarah daging dalam keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang. Spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral, dan bakat akan berkembang seiring berjalannya waktu dan tertanam

¹⁹ Zubaedi, *Desain Pendidikan karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga Pendidikan*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 15



kuat dalam diri setiap siswa hingga menjadi sifat. Karakter adalah kualitas yang terkait erat dengan diri individu dan mencakup komponen psikologis, emosional, intelektual, dan spiritual.²⁰

Karakter dapat diartikan sebagai tanda pengenal atau identitas diri seseorang. Identitas seseorang dapat dilihat dari tingkah laku dan tindakan seseorang berdasarkan kepercayaan terhadap nilai kebaikan secara umum. Tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang menjadi suatu habit dan kebiasaan seseorang akan menjelma jadi karakter yang tertancap dan menyatu pada jiwa seseorang.²¹ Karakter juga diartikan sebagai nilai kebaikan, akhlak dan moral yang telah tertanam dalam diri yang menjadi nilai dasar dalam jiwa manusia yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku manusia.²²

Dapat kita pahami bahwa karakter ialah sesuatu yang telah tertanam dengan sangat dalam dan melekat pada diri seseorang hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan dalam kehidupannya yang didasarkan pada keyakinan yang dia miliki, kemudian karakter menjelma menjadi prinsip dasar manusia yang melandasi cara berfikir, bersikap dan perilaku manusia tersebut.

Setelah memahami apa itu karakter, maka baru dapat kita definisikan dengan baik tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter

²⁰ Abdul Aziz Hasibuan, Darwyan Syah, and Marzuki, "MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA (Studi Pada SMAN Dan MAN Di Jakarta)," *TARBAWI: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4 (2018): 191–212.

²¹ Ahmad Salim, "Manajemen Pendidikan Karakter Di Madrasah (Sebuah Konsep Dan Penerapannya)," *Tarbawi* 1, no. 02 (2015): 1–16.

²² *Ibid.*



ialah suatu upaya untuk menanamkan nilai perilaku kepada segenap warga sekolah dengan berbagai komponennya baik dari segi kesadaran atau kehendak, pengetahuan, tindakan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut, baik kepada sang pencipta, sesama makhluk maupun alam untuk menjadi manusia yang sempurna.²³

Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁴

Sebagaimana simpulan yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan berbagai upaya yang disusun dan dilakukan secara sistematis sebagai upaya menanamkan perilaku peserta didik yang terhubung dengan Tuhannya, dirinya, lingkungan, sesama manusia, kebangsaan yang

²³ Darmiyati Zuchdi, *Pendidikan Karakter, Konsep Dasar Dan Implementasi Di Perguruan Tinggi* (UNY Press, 2015). hal. 3.

²⁴ Ali Miftakhu Rosad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–190.



terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan berdasarkan nilai dan norma keagamaan, tata karma budaya serta adat istiadat.²⁵

Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan siswa yang memiliki tingkat kemanusiaan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang luhur, sehingga siswa siap untuk menghadapi tantangan kehidupan saat ini dan masa akan datang.²⁶

Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya bersama untuk membantu individu dalam memahami, peduli, dan menerapkan prinsip-prinsip etika. Ketika kita mempertimbangkan jenis karakter yang kita inginkan untuk peserta didik, maka kita bermaksud untuk menjadikan mereka manusia yang mampu membuat keputusan moral terlepas dari tekanan baik dari dalam maupun dari luar.

Agar pendidikan karakter dapat terlaksana maka perlu pengorganisasian yang baik. Sedikitnya ada lima hal penting berkaitan dengan organisasi pembelajaran dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan, pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, pengembangan, dan penataan kebijakan serta keterbatasan pembelajaran.²⁷

²⁵ Salim, "Manajemen Pendidikan Karakter Di Madrasah (Sebuah Konsep Dan Penerapannya)."

²⁶ Ibid.

²⁷ Mulyasa, E *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013)., hlm. 144.



Pembinaan karakter siswa yang ditunjukkan dengan pemahaman mereka tentang tata krama, nilai-nilai dalam kehidupan, pembentukan karakter, dan pengembangan akhlak mulia, dipandang membutuhkan lebih dari sekedar pembelajaran budaya dan karakter; Hal tersebut harus dilakukan secara holistik atau didukung oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sistem manajemen pendidikan karakter sekolah.²⁸

Tidak sedikit pakar pendidikan karakter yang memberikan tawaran tentang nilai-nilai dasar yang harus dikembangkan untuk membangun karakter seseorang. Dengan merujuk berbagai pakar pendidikan karakter, Agustian kemudian menetapkan tujuh nilai utama untuk membangun karakter, yaitu:

- 1) Kejujuran, yakni sikap dan perilaku seseorang sebagai upaya agar mendapat kepercayaan orang lain.
- 2) Tanggungjawab, yakni sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan kepada siapapun.
- 3) Visioner, yakni kemampuan seseorang untuk membangun kehidupan masa depan lebih baik.
- 4) Kedisiplinan, yakni sikap dan perilaku yang menunjukkan ketertiban dan kepatuhan akan peraturan.

²⁸ Hasibuan, Syah, and Marzuki, "MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA (Studi Pada SMAN Dan MAN Di Jakarta)."



- 5) Kerjasama, yakni sikap dan perilaku sinergitas dengan pihak lain demi mencapai tujuan bersama.
- 6) Keadilan, keadilan yakni sikap dan perilaku tidak berat sebelah sehingga terhindar dari perbuatan yang semena-mena.
- 7) Kepedulian, yakni sikap dan perilaku yang didasarkan atas simpati dan empati kepada orang lain dan lingkungannya.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami pengelolaan atau manajemen pendidikan karakter yaitu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mendorong, mengontrol, dan melakukan berbagai upaya didalam mengatur dan memaksimalkan sumber daya manusia dan alam yang ada di sekolah sebagai upaya menanamkan pendidikan karakter pada siswa secara efektif dan efisien agar tujuan dari pada pendidikan tercapai.

B. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi

Asal kata moderasi yaitu *moderation*, artinya adalah sikap tengah-tengah atau sikap tidak melewati batas. Sehingga pribadi moderat ialah mampu menerima suatu perbedaan, dan meyakini bahwa beda bukan berarti musuh, akan tetapi perbedaan merupakan keniscayaan yang indah.³⁰

²⁹ Ary Ginanjar, "Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual: ESQ," *Jakarta: Arga* (2007).

³⁰ Muria Khusnun Nisa, Ahmad Yani, Andika, Eka Mulyo Yunus and Yusuf Rahman, "Moderasi Beragama: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama Dan Implementasi Di Era Disrupsi Digital," *Jurnal Riset Agama* 1, no. Desember (2021): 79–96.



Kata moderat di dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terkandung di dalam QS.al-Baqarah [2] : 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا.....³¹

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu,.....”³¹

Kata *al-Wasath* bermakana terbaik. Dalam sebuah Hadis juga dikatakan sebaik-baik perkara ialah yang tengah-tengah (sedang-sedang).³² Moderasi dikenal sebagai tawassuth yang berarti tengah-tengah, *al-‘adl* yang berarti adil, sedangkan *tawazun* adalah berimbang. Jika seseorang memiliki prinsip *wasathiyah* maka berarti ia adalah individu berpredikat “terbaik”. Sedangkan makna kata yang digunakan memiliki arti yang sama yaitu adil. Yaitu mampu menempatkan diri pada posisi di tengah diantara banyaknya opsi-opsi ekstrim.³³

Dalam kamus bahasa Arab kata *al-‘adl* pada mulanya berarti “sama”. Sedangkan dalam kamus KBBI, “adil” bermakna; 1) tidak berat sebelah/tidak memihak, 2) berpihak kepada kebenaran, dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.³⁴

³¹ <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/143>

³² Abror Mhd., “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam Dan Keberagaman),” *Rusydiah* 1, no. 1 (2020): 137–148.

³³ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Kementerian Agama, 2019).

³⁴ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 2012), hal. 23.



Selain prinsip *tawassuth* dan *al-'adl* yang juga sangat penting dalam menjadi pribadi yang moderat ialah prinsip *tawazzun*. Prinsip moderasi dalam hal ini berwujud keseimbangan semua aspek yang bersifat positif, yang bersifat materi atau non-materi, daln lain sebagainya.³⁵ Selain itu, Islam moderat memprioritaskan sikap *tamasuh* yakni saling menghargai perbedaan tanpa menghadirkan aksi anrakis, meskipun tetap berkeyakinan dengan pendapat masing-masing.³⁶

Dengan demikian seseorang dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang mampu menerapkan prinsip moderasi jika orang tersebut bisa memposisikan dirinya berada pada posisi di tengah-tengah, bersikap adil dan berimbang dalam memandang suatu permasalahan yang ia hadapi.

2. Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan prilaku beragama yang dianut, diyakini dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negara Indonesia, sejak dahulu sampai saat ini. Pemerintah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama ialah meyakini kebenaran agama masing-masing secara kokoh akan tetapi juga menghargai, menghormati penganut agama

³⁵ Alif Cahya Setiyadi, "Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi," *At-Ta'dib* 7, no. 2 (2012).

³⁶ Darlis Dawing, "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2017): 225–255.



lain yang juga meyakini atas kebenaran agamanya, tanpa harus membenarkannya.

Dalam konteks sosial-budaya, moderasi beragama ialah bersikap baik dan adil kepada sesama tanpa memandang perbedaan agama. Dalam konteks bernegara ialah setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat agama yang dianutnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa prinsip utama dalam moderasi ialah sikap *tawassuth* yakni berada di tengah-tengah atau menjadi penengah, sikap *'adlu* yakni mampu bersikap adil dan tidak berat sebelah dan sikap *tawazzun* yang berarti berimbang dalam menjalani kehidupan. Harus dipahami juga bahwa moderasi tidak tertentu diamalkan oleh satu agama dan ajaran saja, namun terkandung di beberapa ajaran, agama, dan tradisi serta peradaban dunia. Bersikap dan berperilaku adil dan berimbang begitu dipedomani oleh setiap ajaran keagamaan, karena tidak ada agama mendidik kelaliman secara khusus maupun umum.³⁷

Dalam pandangan yang berbeda, nilai-nilai moderasi yang diprioritaskan dapat bervariasi di antara kelompok sosial yang berbeda. Ada sembilan kebajikan moderasi yang diajarkan Islam sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Aziz and A. Khoirul Anam bahwa para ulama peserta KTT Bogor 2018 menciptakan tujuh dari sembilan indikator. Sementara itu, Kementerian Agama menambah dua nilai baru yaitu anti kekerasan

³⁷Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Kementerian Agama, 2019)



dan menghormati tradisi, dalam hukum Islam juga tersedia dan mengandung kedua nilai tersebut.³⁸

Kesembilan nilai moderasi atau *wasathiyah* itu adalah tengah-tengah (*tawassuth*), tegak-lurus (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), keteladanan (*qudwah*), cinta tanah air (*muwathanah*), anti kekerasan (*la 'unf*) dan ramah budaya (*i'tibar al-'urf*).³⁹

Tujuan mengembangkan kualitas mental terbaik bagi warga Indonesia mengarah pada pemilihan sembilan nilai moderasi. Islam menegaskan bahwa posisi di tengah selalu yang terbaik. Berbekal jiwa yang moderat, bangsa Indonesia diharapkan mampu mempertahankan kemerdekaannya dan mewujudkan cita-cita kebangsaan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Mewujudkan cita-cita konstitusi adalah tanda bahwa seorang Muslim patuh terhadap kesepakatan bangsa.⁴⁰

Lebih lanjut, Kementerian Agama menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah suatu upaya untuk membawa kembali cara praktik beragama yang sejalan dengan substansinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia, bukan sebaliknya.⁴¹ Selanjutnya Abror Mhd. mengatakan bahwa ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk

³⁸ Abdul Aziz and A. Khoirul Anam, "Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam" (2021), www.pendis.kemenag.go.id/pai/.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Agama, *Moderasi Beragama*. 2019



pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.⁴²

Perwujudan yang diharapkan dengan konsep moderasi beragama sebagai dampak dari pengamalan sembilan nilai tersebut, ialah dapat terbentuknya pola pikir, cara bersikap, maupun perilaku beragama yang baik. Secara khusus, wujud dari perilaku moderasi beragama itu diharapkan tampak dengan jelas dalam kepribadian dan tata-ibadah seseorang dalam kehidupannya.⁴³

Dari berbagai cara pandang dan pendapat yang telah kami sebutkan diatas, maka dapat kita pahami maksud dari moderasi beragama ialah sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk pada upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk senantiasa meninggalkan tindakan secara ekstrem, radikal dan anarkis dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴² Abror Mhd., “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam Dan Keberagaman).”

⁴³ Aziz and Anam, “Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam.”